

**POLITIK HUKUM MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERPANJANGAN MASA
JABATAN KEPALA DESA**

SKRIPSI

Oleh

FAWWAS

NIM. 05040421078



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAWWAS
NIM : 05040421078
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Politik Hukum Masa Jabatan Kepala Desa dalam
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang
Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Januari 2025
Saya yang menyatakan,



FAWWAS
NIM. 05040421078

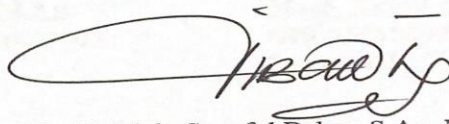
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : FAWWAS
NIM. : 05040421078
Judul : Politik Hukum Masa Jabatan Kepala Desa dalam
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang
Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 09 Januari 2025
Pembimbing,



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.
NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : FAWWAS

NIM. : 05040421078

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 17 Feberuari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



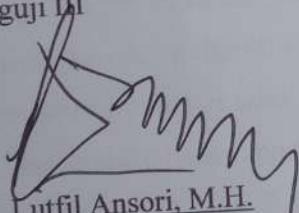
Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag. M.S.i
NIP. 197803152003121004

Penguji II



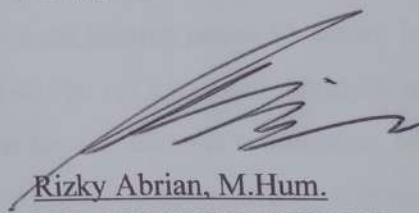
Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192004011003

Penguji III



Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 24 Feberuari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199903200



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAWWAS
NIM : 05040421078
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : FawazSyaputra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Politik Hukum Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Mei 2025
Penulis

(FAWWAS)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Politik Hukum Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa” untuk menjawab pertanyaan mengenai: Bagaimana politik hukum masa jabatan Kepala Desa dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.

Data penelitian dihimpun dengan teknik dokumenter kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu data akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongrit mengenai masa jabatan kepala desa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, selanjutnya dianalisis dengan konsep Imamah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa menyebutkan dapat dipilih selama 2 kali masa jabatan setara 16 tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal itu juga menimbulkan multi tafsir terhadap masa jabatan kepala desa, baik kepala desa yang menjabat berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Masa jabatan tersebut sesuai dengan *fiqh siyasah dusturiyah* sebagai konsep seorang imamah diperbolehkan menjabat selama mungkin apabila dapat mengemban amanah sebelumnya diatur dalam islam dan tidak terdapat batas waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan pemerintah seharusnya menyelaraskan masa jabatan kepala desa serta elemen pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penulisan	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	21
A. Fiqh Siyasah dalam Politik Hukum Kepala Desa.....	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah	21
2. Fiqh Siyasah Dusturiyah	22
3. Politik Hukum	25
4. Kepala Desa	27
B. Kajian Teori	30
1. Teori Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik	30
2. Teori Pembatasan Kekuasaan	33
3. Teori Asas-Asas Hukum Tata Negara	41
4. Konsep Jabatan	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Politik Hukum Perpanjangan Jabatan Kepala Desa	50
1. Permohonan Tuntutan Kepala Desa dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.....	50
2. Pertimbangan Hakim dalam Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Pemohon	53
3. Putusan Hakim dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	56
BAB IV ANALISIS YURIDIS FQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA	59
A. Analisis Yuridis Fiqh Siyasah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa	59
B. Tinjauan Analisis Fiqh Dusturiyah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	

Daftar Pustaka

- Ahmad Syaiful Maarif, Abd. Hadi, And Moh Sa'diyin, 'Fenomena Perodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)', *Josh: Journal Of Sharia*, 3.01 (2024), Pp. 29–39, Doi:10.55352/Josh.V3i01.701
- Alfarabi, Muchlisin, 'The Problem Of Constitutionalism Of Village Head Tenure In The Dimension Of The State Of Law And Democracy', *De Recht (Journal Of Police And Law Enforcement)*, 2024, Pp. 15–32, Doi:10.55499/Derecht.V2i2.219
- Hakim, Dani Amran, And Muhammad Havez, 'Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah', *Tanjungpura Law Journal*, 4.2 (2020), P. 95, Doi:10.26418/Tlj.V4i2.41913
- Jopinus Ramli Saragih, 'Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa', *Atrabis Jurnal Administrasi Bisnis (E-Journal)*, 10.1 (2024), Pp. 132–42, Doi:10.38204/Atrabis.V10i1.1931
- Kafin Muhammad, 'Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.', *Jil : Journal Of Indonesian Law*, 4.1 (2023), Pp. 1–26, Doi:10.18326/Jil.V4i1.1000
- Putri, Utari Lorensi, And Sulastrri Caniago, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum', *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2.2 (2021), P. 193, Doi:10.31958/Jisrah.V2i2.4347
- Rahmatillah, Mirza, And Ridwan Nurdin, 'Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dan Uu Desa No. 6 Tahun 2014', *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5.2 (2020), P. 91, Doi:10.22373/Justisia.V5i2.8456
- Suharmartha, Sherly Danti, 'Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa'
- Suryaningsih, Suryaningsih, Yahya Krisnawansyah, Zamhasari Zamhasari, Tengku Fahrul Gafar, And Santi Octavia, 'Analysis Of The Village Head Replacement Mechanism Based On Law Number 6 Of 2014 Concerning Villages And Derivative Regulations', *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 3.2 (2023), Pp. 82–94, Doi:10.69989/Yc477509

Susanto, Susanto, And Abdur Rahim, 'Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Undang-Undang Desa Dan Fiqh Siyasah; Studi Kasus Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu', *Journal Of Legal Research*, 3.1 (2021), Pp. 27–40, Doi:10.15408/Jlr.V3i1.19706

Yasin Al Arif, M., Wahlulia Amri, And Inda Dzil Arsyi Makiin, 'Constitutionality Of Open Legal Policy Making Law Number 3 Of 2022 Concerning The State Capital In The Perspective Of Siyasa Dusturiyyah', *Kne Social Sciences*, 2024, Doi:10.18502/Kss.V9i2.14995

Averus, Ahmad, And Dinda Alfina, 'Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa', 6 (2020)

Suhunan, Evaline, And Purba Made Aubrey, 'Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi'

Averus, Ahmad, And Dinda Alfina, 'Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa', 6 (2020)

Suhunan, Evaline, And Purba Made Aubrey, 'Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi'

Hr. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada)

Sandy Mulia Arhdan, "Problematisasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi", *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023. 174.

Nur Hayati, Mikhael Gewati, Masa Jabatan Kades Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Ketua Baleg Dpr: Untuk Jaga Stabilitas Desa. *Kompas.Com* 23 Juni 2023. Masa Jabatan Kades Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Ketua Baleg Dpr: Untuk Jaga Stabilitas Desa (*Kompas.Com*)

Sandy Mulia Arhdan, "Problematisasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi", *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023. 174.

Zafarrifon Ayubi, "Politik Hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa Mengenai Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Prespektif Saad Al- Dzari'ah", (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Dan Hukum ,Tahun 2023)

- Fita Dwi Pratiwi,”Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara”(Jurnal Riset Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023); 256
- Yuda Riskiawan,” Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perpektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”(Skripsi Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achamad Sidiq Jember Tahun 2023).
- Purna Hadi Swasono,” Analisi Fiqih Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019)
- Daffa Ramadhan.,” Tinjaun Yuridis Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/Puu-Xix/2021 Tentang Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa”.(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2023)
- Afifah, Febrina, Emilda Firdaus, And Ledy Diana, ‘Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu-Xxi/2023 Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi’, 10 (2024)
- Akhmaddhian, Suwari, ‘Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governace’, *Journal Of Multidisciplinary Studies*, 09
- Althof, Ahmad, ‘Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No.3 Tahun 2024 Tentang Desa’, 2024
- Alwi, Abel, ‘Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024 M/ 1445 H’
- Asufie, Khairunnisa Noor, And Ali Impran, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan’, *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization*, 9.2 (2021), P. 37, Doi:10.20961/Jolsic.V9i2.54803
- Atmadja, Dewa Gede, ‘Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum’, 12 (2018)
- Averus, Ahmad, And Dinda Alfina, ‘Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa’, 6 (2020)
- Badra, Amdiendo, ‘(Studi Di Desa Sinarharapan Kecamatan Talangpadang

Kabupaten Tanggamus)', 2014

- Ira Sandika, Syarif Aini, Yona Kristin Simbolon, And Sri Hadiningrum, 'Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2024), Pp. 212–23, Doi:10.62383/Terang.V1i1.89
- Kaingge, Meriam Marcelina, 'Supremasi Hukum Atas Asas Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945', 3
- Khairi, Mawardi, '5 Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerahpersepektif Teori Negara Hukum', 3 (2017)
- Khairuddin, Dr H, And Dani Amran Hakim, 'Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444 H / 2023 M', 2014
- M. Nggilu, Novendri, 'Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 16.1 (2019), P. 43, Doi:10.31078/Jk1613
- Mahardika, Mayuko Galuh, And Heru Suseno, 'Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa', 4 (2018)
- Ma'rifah, Nurul, 'Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Dan Nomor 2/Puu-Xix/2021', *Notary Law Journal*, 1.2 (2022), Pp. 204–26, Doi:10.32801/Nolaj.V1i2.23
- Marlina, Rika, 'Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), Doi:10.30659/Jdh.V1i1.2631
- Mulyanto, M, 'Keberlakuan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Bali Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27.3 (2016), P. 418, Doi:10.22146/Jmh.15880
- Nurfatima, M. Taufan B., And Muhammad Taufik, 'Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah', *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3.2 (2022), Pp. 211–36, Doi:10.24239/Qaumiyyah.V3i2.45
- Pamungkas, Susandi Decapriu Putra, And Gede Ngurah Darma Suputra, 'Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Checks And Balances Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat', 2.2 (2023)
- Pralampita, Tyas Winny, 'Tujuan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Kesesuaiannya Dengan Sistem Pemerintahan Di Indonesia', 5.1 (2024)
- Riskiawan, Yuda, 'Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember Fakultas Syariah November 2023', 2014

- Ritonga, Mei Fiani, 'Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk Ri No. 42/Puu-Xix/2021 Perspektif Fiqih Siyasah', 6 (2024)
- Robuan, Rahmat, 'Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus Dan Isitimewa Dalam Teori Negara Kesatuan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Jurnal Fakta Hukum (Jfh)*, 1.1 (2022), Pp. 86–100, Doi:10.58819/Jurnalfaktahukum(Jfh).V1i1.30
- Santoso, Bambang, 'Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang'
- Shafilla, Bhety, 'Progam Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2024', 2024
- Soemarsono, Maleha, 'Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37.2 (2017), P. 300, Doi:10.21143/Jhp.Vol37.No2.1480
- Suhartono, Slamet, Ahmad Mahyani, Wiwik Afifah, Dwi Putri Sartika, And Risya Tatamara, 'Implementation Of Law Number 6 Of 2014 Concerning Village For Budgeting Plan In Sidoarjo Regency', In *Proceedings Of The International Conference On Law Reform (Inclar 2019)* (Presented At The International Conference On Law Reform (Inclar 2019), Atlantis Press, 2020), Doi:10.2991/Aebmr.K.200226.042
- Suhunan, Evaline, And Purba Made Aubrey, 'Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi'
- Sy, Helmi Chandra, 'Desain Konstitusionalitas Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi', 12.1 (2023)
- Umarama, Tarsan, 'Inkonstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa', 10.1
- Yossita, Ghannesdeva Nadia, 'Law Number 6 Year 2014 About Village Regulation As A Lex Specialist In Indonesian National Law Politics'
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011), 111
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 79
- Winner Sitorus, "Pyrolysis Study Biochar's," Astuti D.S, Sani 29, No. 1 (2018).
- Y Chamidah., Bab Iii Metode Penelitian (Research) Iain Kudus.Tahun 2023);59
- Risalah Persidangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Masa Perodesai Kepala Desa

Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/Puu-Xix/2021 Tentang
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Risalah Persidangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Masa Jabatan
Kepala Desa



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A